

## **BIG DATA DAN SENTIMEN ANALISIS TWITTER DALAM BINGKAI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA**

**Genta Mahardhika Rozalinna<sup>1</sup>, Violetta Lovenika Nur Anwar<sup>2</sup>,  
Pinasthika Nirmala Dewi<sup>3</sup>, Sofiurrohman<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya  
email: gmrozalinna@ub.ac.id*

<sup>2</sup>*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya  
email: violettalna@student.ub.ac.id*

<sup>3</sup>*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya  
email: pinasthikand@student.ub.ac.id*

<sup>4</sup>*Departemen Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya  
email: sofiurrohman17@student.ub.ac.id*

### **ABSTRAK**

*Tulisan ini bertujuan untuk melakukan telaah kritis pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada tanggal 15 Februari 2022. Gelombang pro dan kontra pada masyarakat Indonesia bermunculan justru sebelum ditetapkannya undang-undang tersebut dengan beragam dimensi argumentasi. Gelombang tersebut banyak bermunculan salah satunya pada ruang-ruang percakapan digital melalui platform media sosial berupa twitter yang biasa disebut dengan percakapan warga twitter. Tulisan ini menyajikan big data dan sentimen analisis yang dikumpulkan dengan menggunakan metode scrapping data twitter pasca ditetapkannya undang-undang. Hasilnya adalah ditemukan 381 tweet terkait dengan bingkai pemindahan Ibu Kota Negara yang terdiri dari: (1) Pemindahan Ibu Kota Negara, (2) Konflik Pemindahan Ibu Kota Negara, (3) Agraria Pemindahan Ibu Kota Baru, (4) Konflik Adat Pemindahan Ibu Kota Baru, dan (5) Ekologis Ibu Kota Baru. Maka berdasarkan 381 tweet dan 5 kata kuncinya tersebut dihasilkan tiga sentimen analisis campuran yaitu sentimen positif dengan persentase sebesar 32,02%, sentimen netral dengan persentase sebesar 56,17%, dan sentimen negatif dengan persentase sebesar 11,81%. Sentimen netral menjadi data paling tinggi yang diartikan bahwa tweet dari warga twitter cenderung tidak mengekspresikan sikap kontra atau mendukung isu yang dibahas pada 381 tweet dan 5 kata kuncinya.*

**Kata kunci:** *Big data; Ibu Kota Negara; IKN; Sentimen analisis; Twitter*

### **1. PENDAHULUAN**

Kebijakan tentang pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni kebutuhan untuk pengembangan wilayah ekonomi baru, menurunkan ketimpangan antar-wilayah, serta guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dibuktikan melalui terbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 18

Januari 2022. Selain itu, pengesahan tersebut juga ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022 (Saraswati dan Adi, 2022). Sayangnya, tujuan tersebut tidak dapat terlepas dari konflik terhadap pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini dapat berpengaruh terhadap potensi munculnya konflik sosial antar kelompok etnis dan keberadaan simbolisasi nasional serta kekayaan lokal di Ibu Kota Negara (Mazda, 2022). Terlebih lagi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, provinsi Kalimantan Timur menjadi daerah yang mengalami konflik massal tertinggi daripada provinsi lainnya yang berada di Pulau Kalimantan. Pada kasus pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan potensi terjadinya konflik dapat terjadi karena adanya pengelompokan di masyarakat antara masyarakat lokal dan pendatang (Djayanti, dkk., 2022). Hal ini juga dikatakan oleh salah satu pengguna sosial media *twitter* bahwa "Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim Rawan Memicu Konflik Sosial" (<https://t.co/GjjKJki8QH>).

## 2. METODE

Ruang-ruang diskusi tentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) semakin menggema dari berbagai aras mulai dari masyarakat sipil berbagai usia, status sosial ekonomi dan gender, organisasi-organisasi non pemerintah, kajian-kajian kritis kemahasiswaan serta kelompok-kelompok elit yang mengarah pada tiga sikap seperti setuju, agak setuju, dan tidak setuju. Namun dari berbagai kelompok-kelompok tersebut, hadirnya masyarakat di ruang-ruang diskusi digital juga menarik untuk dikaji dengan lebih kritis. Pasca ditetapkannya IKN melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022, maka kami sebagai peneliti yang hadir dalam dua aras kehidupan di masyarakat non digital dan digital tergugah untuk ikut mencari tahu atas diskusi pemindahan IKN pada masyarakat digital.

Untuk kepentingan menggali data diskusi pemindahan IKN pada masyarakat digital maka kami menggunakan metode penelitian yang menyajikan *big data* dan sentimen analisis dengan model *scraping* data *twitter* pasca ditetapkannya undang-undang. Aplikasi yang digunakan adalah platform Python khusus *scraping*. Pertama, *scraping* dilakukan untuk mencari informasi yang ingin diambil melalui data *twitter*; kedua, *scraping* melalui Python berfungsi untuk mengekstrak informasi yang diinginkan dari website, database, aplikasi enterprise; ketiga, *scraping* yang digunakan adalah html request karena *twitter* menggunakan format html dari browser dan firefox; keempat, informasi yang diekstrak adalah tanggal, *username*, *likes*, *retweet*, *reply*, isi *twitter*, *link* (hanya tweet saja); kelima, dari masing-masing hasil informasi kemudian dilakukan penyortiran (pengelompokkan tweet yang pernah *retweet*); keenam, tweet yang pernah di *retweet* dilakukan *scraping* kembali untuk mengekstrak informasi siapa saja yang melakukan *retweet*; ketujuh, menyusun tabel yang terdiri dari 2 kolom untuk membuat SNA, yaitu sumber dan target. Sumber adalah akun yang di *retweet*, sedangkan target adalah akun yang melakukan *retweet*; kedelapan, dari dataset dibuat SNA dengan edges *retweet*; dan kedelapan, besar kecilnya (ukuran) *nodes* (akun yang berada dalam jaringan) — mendefinisikan jumlah *retweet* terhadap akun tersebut. Sedangkan ketebalan *edges* (hubungan antara *nodes* atau relasi yang menghubungkan *nodes*) mendefinisikan intensitas *retweet*.

Selain itu sebagai tambahan, penyajian data berupa *wordcloud* juga digunakan untuk memudahkan pembaca dalam melihat hasil visualisasi dari big data. Pertama, melakukan *scraping* menggunakan Python; kedua, *scraping* selanjutnya adalah menghitung kata pada isi tweet menggunakan *wordcloud* generator; ketiga, melakukan filter pada kata-kata yang tidak substantif (dan-selalu- dll) sehingga tidak muncul di *display*; dan keempat, besar atau kecilnya ukuran *font* mendefinisikan intensitas kata yang sering digunakan.

Semua penggalan data di dalam tulisan ini memang berasal dari data yang dibahas dalam masyarakat digital khususnya pada sosial media *twitter*, namun untuk proses analisis dan

interpretasi data tetaplah menggunakan proses manual dengan mengedepankan penglibatan tenaga manusia yang memiliki latar belakang dalam keilmuan Sosiologi. Proses ini kami lakukan sebagai bagian dari proses filter terhadap data-data digital yang telah dikumpulkan menggunakan mesin otomatis.

### 3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

#### 3.1. Indikator Pemindahan Ibu Kota

Berdasarkan hasil interpretasi pada *big data* dan sentimen analisis pada indikator “Pemindahan Ibu Kota” menggambarkan hasil *sentiment analysis*, yaitu "*neutral*" dengan persentase sebesar 59,28%, "*positive*" sebesar 29,94% dan "*negative*" sebesar 10,78%. Artinya, masyarakat cenderung biasa saja terhadap permasalahan pada indikator pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa, masyarakat mendukung pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 1.**  
Persentase Sentimen Analisis Indikator Pemindahan Ibu Kota Negara

Sentiment	Persentase
Positive	29,94%
Neutral	59,28%
Negative	10,78%

#### 3.2. Indikator Dampak Adat Pemindahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan hasil interpretasi pada *big data* dan sentimen analisis pada indikator “Pemindahan Ibu Kota” menggambarkan hasil *sentiment analysis*, yaitu "*neutral*" dengan persentase sebesar 36,36%, "*positive*" sebesar 45,45% dan "*negative*" sebesar 18,18%. Artinya, masyarakat cenderung biasa saja terhadap permasalahan pada indikator pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa, masyarakat mendukung pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 2.**  
Persentase Sentimen Analisis Indikator Pemindahan Ibu Kota Negara

Sentiment	Persentase
Positive	36,36%
Neutral	45,45%
Negative	18,18%

### 3.3. Indikator Konflik Pemindahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan hasil interpretasi pada *big data* dan sentimen analisis pada indikator “Konflik Pemindahan Ibu Kota Negara” menggambarkan hasil *sentiment analysis*, yaitu "*neutral*" dengan persentase sebesar 62,50%, "*positive*" sebesar 25,00% dan "*negative*" sebesar 12,50%. Artinya, masyarakat cenderung biasa saja terhadap permasalahan pada indikator konflik pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa meskipun terdapat potensi konflik sosial yang dapat muncul, masyarakat tetap mendukung pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 3.**  
Persentase Sentimen Analisis Indikator Konflik Pemindahan Ibu Kota Negara

Sentiment	Persentase
Positive	25,00%
Neutral	62,50%
Negative	12,50%

### 3.4. Indikator Agraria Pemindahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan hasil interpretasi pada *big data* dan sentimen analisis pada indikator “Agraria Pemindahan Ibu Kota Negara” menggambarkan hasil *sentiment analysis*, yaitu "*neutral*" dengan persentase sebesar 44,44%, "*positive*" sebesar 22,22% dan "*negative*" sebesar 33,33%. Artinya, masyarakat cenderung biasa saja terhadap permasalahan pada indikator agraria pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa masyarakat tetap mendukung pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 4.**  
Persentase Sentimen Analisis Indikator Konflik Pemindahan Ibu Kota Negara

Sentiment	Persentase
Positive	22,22%
Neutral	44,44%
Negative	33,33%

### 3.5. Indikator Ekologi Pemindahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan hasil interpretasi pada *big data* dan sentimen analisis pada indikator “Pemindahan Ibu Kota” menggambarkan hasil *sentiment analysis*, yaitu "*neutral*" dengan persentase sebesar 33,33%, "*positive*" sebesar 33,33% dan "*negative*" sebesar 33,33%. Artinya, masyarakat cenderung biasa saja terhadap permasalahan pada indikator pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa, masyarakat mendukung pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

**Tabel 5.**  
Persentase Sentimen Analisis Indikator Pemindahan Ibu Kota Negara

Sentiment	Persentase
Positive	33,33%
Neutral	33,33%
Negative	33,33%

#### 4. KESIMPULAN

Diskusi-diskusi tentang rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi pembahasan baik di masyarakat non digital dan digital. Pada masyarakat non digital, kelompok dan isu yang dibahas terklasifikasi dengan konkrit, sedangkan pada masyarakat digital, kelompok dan isu menjadi pembahasan yang tampil di permukaan saja. Namun satu hal yang penting dalam temuan kami adalah kajian-kajian krisis ekologis dalam rencana pemindahan IKN merupakan isu yang sedikit sekali mendapat perhatian, karena kenyataannya perpindahan tersebut akan berhadapan dengan kehidupan dari masyarakat adat. Maka, rencana pembangunan tersebut harus mempertimbangkan konteks ekologis demi keberlanjutan dari kehidupan banyak entitas baik manusia dan non manusia.

#### REFERENSI

- Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. 2022. *Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia*. (Jurnal Damai dan Resolusi Konflik, 8(1), 1–15).
- Mazda, C. N. 2022. *Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security*. (Jurnal Enersia Publika, 6(1), 269–277).
- Saraswati, M. K., dan Adi, E. ariananto W. 2022. *Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot*. (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 6(2), 4042–4052).